

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi. 2010.*Stelsel Pidana. Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010.*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*.Sinar Grafika. Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2016.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Rajawali Pers. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012.*Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*.Rangkang Education. Yogyakarta.
- Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016.*Hukum Pidana*.Pustaka Penapres. Makassar.
- Andi Zainal Abidin et al. 2010.*Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Yarsif Watampone. Jakarta.
- Bambang Purnomo. 1994. *Tenaga Listrik, Profil dan Anatomi Hasil Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun*.PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Eddy O.S. Harriej. 2016.*Prinsip-prinsip Hukum Pidana*.Cahaya Atma Pusaka. Yogyakarta.
- E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. 1982.*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.Alumni AHM-PTHM. Jakarta.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2014.*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*.Kencana. Jakarta.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein. 2006.*Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.Sinar Grafika. Jakarta.

- Kristian. 2014.*Hukum Pidana Korporasi*.Nuansa Aulia. Bandung.
- Lamintang. 1997.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2014.*Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*.PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moeljatno. 2002.*Asas-asas Hukum Pidana*.Rineka Cipta. Jakarta.
- Muladi dan Priyatno Dwidja. 2010.*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.Kencana. Jakarta.
- Setiyono. 2015.*Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*.Bayumedia Publishing. Malang.
- Sunaryati Hartono. 2006.*Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*.Alumni. Bandung.
- Sudaryono, Natangsa Surbakti. 2017.*Hukum Pidana “Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP”*. Muhammadiyah University Press. Surakarta.
- Roni Wiyanto. 2012.*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*.CV.Mandar Maju. Bandung.
- Wahyu Untara. 2014.*Kamus Bahasa Indonesia*.Indonesia Tera. Yogyakarta.
- Shidarta. 2004.*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*.PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2006.*Hukum Acara Perdata Indonesia*.Liberty. Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2017.*Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*.Kencana. Jakarta.

Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Skripsi:

Fahrurrazi Parinduri, 2020, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi" (Analisis Putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm)

Arismunandar Amiruddin, 2018, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang"

Dewi Lestari Simanjuntak, 2013, "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLM (PERSERO) Dengan Pelanggan"

Jurnal:

Febryanto Samuel Pangkey, "Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Ketenagalistrikan", *Lex et Societatis*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. I. Nomor 3 Juli 2013.

Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25, Nomor 2 April 2007.

Tiovany A.Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap", *Lex Privatum*, Vol.VI, Nomor 4 April 2016.

Sandro Unas, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Lex Et Societatis*, Vol. VII Nomor 4 April 2019.

Yessy Paramita Samadi, "Kajian Yuridis Jaksa penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Lex Crimen, Vol.IV, Nomor 2 April 2015.

Undang-undang:

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan

Website:

<http://konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhap-keterangan-ahli/>